



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

LAPORAN KINERJA 2021

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANG
PURWAKARTA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Tugas, Fungsi, Visi, dan Misi KPKNL Purwakarta	3
B. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>).....	4
1. Permasalahan di Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara.....	4
2. Permasalahan di Seksi Pengurusan Piutang Negara.....	6
3. Permasalahan di Seksi Pelayanan Penilaian.....	7
4. Permasalahan di Seksi Pelayanan Lelang.....	8
5. Permasalahan di Seksi Hukum dan Informasi.....	9
6. Permasalahan di Seksi Subbagian Umum.....	9
7. Permasalahan di Seksi Kepatuhan Internal.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
B. Analisis Kinerja.....	23
1. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara.....	23
2. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja Seksi Pelayanan Piutang Negara	24
3. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja Seksi Pelayanan Penilaian.....	26
4. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja Seksi Pelayanan Lelang.....	26
5. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja Seksi Kepatuhan Internal.....	27
6. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja Sub Bagian Umum.....	28
C. Realisasi Anggaran.....	29
D. Inovasi	30
BAB IV PENUTUP.....	31



BAB I

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai bagian dari Kementerian Keuangan menerapkan reformasi birokrasi sesuai amanat peraturan perundangan, memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang.

Mengingat sangat pentingnya peran tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta, sebagai instansi vertikal DJKN merupakan ujung tombak yang langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna jasa (*stakeholder*), terus berupaya meningkatkan pelayanan dan kinerja secara sistematis dan berkesinambungan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Di samping itu, upaya peningkatan pelayanan dan kinerja dilaksanakan secara sinergis dan komprehensif sehingga terwujud pelayanan terbaik dan sikap kerja yang profesional, akuntabel, transparan sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi sehingga dapat menjadi kantor pelayanan yang dibanggakan oleh masyarakat.

Salah satu langkah kongkrit yang dilakukan oleh KPKNL Purwakarta dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja diantaranya melaksanakan secara konsisten berbagai kebijakan terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, dengan berpedoman pada standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam:

1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
4. Keputusan Menteri keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan.

Di samping hal-hal tersebut di atas, KPKNL Purwakarta sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan Reformasi Keuangan Negara yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan, dengan dilandasi oleh tiga paket Undang-undang di bidang Keuangan Negara, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Salah satu peranan KPKNL dalam mewujudkan Reformasi Keuangan Negara tersebut diantaranya adalah mewujudkan nilai kekayaan negara (Barang Milik Negara) yang wajar dalam neraca pemerintah (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara.

A. TUGAS, FUNGSI, VISI DAN MISI KPKNL PURWAKARTA

KPKNL Purwakarta senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang. KPKNL Purwakarta berperan dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang, maupun dalam melakukan pengamanan kekayaan negara melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara dan sertifikasi tanah pemerintah (Penertiban Barang Milik Negara). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL Purwakarta selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan guna mewujudkan reformasi birokrasi berkesinambungan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam rangka memberikan arah, inspirasi, serta menjaga semangat kerja seluruh jajarannya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal ini KPKNL Purwakarta memiliki visi dan misi sebagai berikut:

VISI

“Menjadi pengelola kekayaan Negara yang professional dan akuntabel bertanggung untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

MISI

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan Negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam tatanan operasional, visi dan misi tersebut akan terus diupayakan untuk dicapai. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, KPKNL Purwakarta telah memberi motivasi dan arah kerja kepada seluruh pegawai dengan motto "**Bergerak menjadi lebih baik**".

Melalui moto tersebut, diharapkan setiap pegawai KPKNL Purwakarta dalam melaksanakan tugas bergerak bersama ke arah yang lebih baik dalam segala aspek sesuai Nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

Berdasarkan **Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**, KPKNL Purwakarta mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut KPKNL Purwakarta menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, Pengadministrasian, Pendayagunaan, Pengamanan Kekayaan Negara;
2. Registrasi, Verifikasi Dan Analisa Pertimbangan Permohonan Pengalihan Serta Penghapusan Kekayaan Negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang Negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang Negara;
5. Pelaksanaan Pelayanan Penilaian;
6. Pelaksanaan Pelayanan Lelang;
7. Penyajian Informasi di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara Dan Lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi Pengurusan Piutang Negara dan Lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran Piutang Negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya (*business process*) untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi, KPKNL Purwakarta mengalami beberapa kendala/permasalahan, diantaranya sebagai berikut:

1. Permasalahan pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

- **Triwulan I**

- a. Sampai dengan triwulan I tahun 2021, dari delapan persetujuan pengelolaan negara, 6 satker belum menyampaikan laporan hasil tindak lanjutnya.

- **Triwulan II**

- a. Dari target 23 bidang baru 11 bidang yang sudah terbit sertifikatnya yaitu dari Kab. Purwakarta, 1 bidang tanah di Kab. Karawang yang masuk kategori K3 tidak dapat diteruskan, 6 bidang lain di Kab. Karawang tidak dapat dilanjutkan, 1 bidang di Kab. Subang dan 4 bidang di Kab. Karawang sudah dilakukan pengukuran, masih proses penerbitan SK. Hal tersebut disebabkan karena ada penguasaan dari pihak ketiga/masyarakat setempat, satker tidak dapat memenuhi kelengkapan dokumen di tahun 2021, terdapat perubahan petugas yang menangani di Kantah.
- b. Bahwa pada tahun 2021 sebanyak 78 NUP BMN yang menjadi target evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) di wilayah kerja KPKNL Purwakarta s.d. Triwulan II telah terselesaikan sebanyak 44 NUP. Dalam situasi pandemi perlu kehati-hatian dalam melakukan cek fisik dalam rangka evaluasi kinerja BMN, diperlukan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik.

- **Triwulan III**

- a. Capaian PNPB BMN 78,19%, disebabkan persetujuan pemanfaatan/pemindahtanganan tidak dilaksanakan.
- b. Bidang tanah yang disertifikatkan, dari target 19 bidang tanah sudah terealisasi 16 bidang tanah dengan status P4, dikarenakan ada penguasaan dari pihak ketiga/masyarakat setempat, Satker tidak dapat memenuhi kelengkapan dokumen di tahun 2021.
- c. Bahwa pada tahun 2021 sebanyak 78 NUP BMN yang menjadi target evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) di wilayah kerja KPKNL Purwakarta s.d. Triwulan III telah terselesaikan sebanyak 65 NUP, dalam situasi pandemi perlu kehati-hatian dalam melakukan cek fisik dalam rangka evaluasi kinerja BMN, diperlukan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik.
- d. Dari 46 persetujuan yang diterbitkan dalam kurun waktu Semester II/2020 s.d. Semester I/2021, s.d. Triwulan III 2021 telah ditindaklanjuti sebanyak 35 persetujuan, Persetujuan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN yang telah terbit tidak ditindaklanjuti, salah satu sebab karena satker belum memahami proses pengajuan lelang BMN secara *online*.

- **Triwulan IV**

- a. Bidang tanah yang disertifikatkan, dari target 19 bidang tanah sudah terealisasi 25 bidang tanah dengan status P4 (Sudah terbit SHP), sehingga target tercapai sebesar 131%, dikarenakan ada penguasaan dari pihak ketiga/masyarakat setempat, Satker tidak dapat memenuhi kelengkapan dokumen di tahun 2021.
- b. Pada tahun 2021 sebanyak 78 NUP BMN yang menjadi target evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) di wilayah kerja KPKNL Purwakarta s.d. Triwulan IV telah

terselesaikan sebanyak 83 NUP, sehingga target tercapai sebesar 106,41 %, dalam situasi pandemi perlu kehati-hatian dalam melakukan cek fisik dalam rangka evaluasi kinerja BMN, diperlukan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik.

- c. Dari 24 persetujuan yang diterbitkan dalam kurun waktu Semester II/2020, telah ditindaklanjuti sebanyak 22 persetujuan. Dari 22 persetujuan yang diterbitkan dalam kurun waktu Semester I/2021, telah ditindaklanjuti sebanyak 20 persetujuan, sehingga capaian IKU sebesar 91,30%, Persetujuan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN yang telah terbit tidak ditindaklanjuti, salah satu sebab karena satker belum memahami proses pengajuan lelang BMN secara *online*.

2. Permasalahan pada Seksi Piutang Negara

Dalam pelaksanaan pengurusan piutang negara masih terdapat beberapa permasalahan di Seksi Piutang Negara, antara lain:

• Triwulan I

- a. Moratorium pengembalian pengurusan PN yang berasal dari penyerahan BPJS, berpengaruh signifikan karena merupakan BKPN potensial, banyak Debitur kondisi ekonomi terdampak pandemi COVID 19 sehingga tidak bisa melakukan pembayaran.
- b. BKPN yang menjadi target penurunan outstanding piutang negara adalah BKPN yang tidak potensial sehingga Capaian IKU outstanding piutang negara menjadi rendah.
- c. Sepanjang Triwulan I 2021, terdapat 5 dari 9 BKPN yang dinyatakan tidak dapat ditagih, menunjukkan tren kenaikan risiko dibanding Q4 Tahun 2020.

• Triwulan II

- a. Sebagian besar BKPN yang diurus adalah BKPN yang tidak potensial sehingga capaian IKU penerimaan negara (Biad PPN) menjadi rendah, disebabkan sebagian besar barang jaminan hutang milik Pihak ketiga dan tidak ada pengikatan, Debitur tidak mengakui mempunyai hutang.
- b. BKPN yang menjadi target penurunan outstanding piutang negara adalah BKPN yang tidak potensial sehingga Capaian IKU outstanding piutang negara menjadi rendah. Target penurunan outstanding piutang negara adalah penurunan nilai outstanding piutang negara BKPN penyerahan s.d. Desember 2017 yang sebagian besar merupakan BKPN yang tidak potensial (debitur mampu namun tidak mengakui hutang, BKPN dengan barang jaminan yang tidak ada pengikatan atau BKPN yang didukung dengan barang jaminan milik pihak ketiga serta barang jaminan yang belum diketahui kejelasan dokumen kepemilikannya).
- c. Pandemi yang belum berakhir menyebabkan kegiatan pengurusan piutang negara tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

d. Realisasi penyelesaian BPKN Q1 berasal dari pelunasan, PSBDT dan Pengembalian BKPN, sebagian besar BKPN merupakan BKPN yang tidak potensial.

- **Triwulan III**

a. Capaian PNBPN 33,11%, disebabkan Debitur tidak mengakui mempunyai hutang, sebagian besar barang jaminan hutang milik Pihak ketiga dan tidak ada pengikatan, sebagian besar BKPN yang diurus adalah BKPN yang tidak potensial sehingga capaian IKU penerimaan negara (Biad PPN) menjadi rendah.

b. Target penurunan outstanding piutang negara adalah penurunan nilai outstanding piutang negara BKPN penyerahan s.d. Desember 2017 yang sebagian besar merupakan BKPN yang tidak potensial (debitur mampu namun tidak mengakui hutang, BKPN dengan barang jaminan yang tidak ada pengikatan atau BKPN yang didukung dengan barang jaminan milik pihak ketiga serta barang jaminan yang belum diketahui kejelasan dokumen kepemilikannya).

c. Pandemi yang belum berakhir menyebabkan kegiatan pengurusan piutang negara tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

- **Triwulan IV**

a. PNBPN 19,97 %, disebabkan Debitur tidak mengakui mempunyai hutang, sebagian besar barang jaminan hutang milik Pihak ketiga dan tidak ada pengikatan, sebagian besar BKPN yang diurus adalah BKPN yang tidak potensial sehingga capaian IKU penerimaan negara (Biad PPN) menjadi rendah.

b. Capaian penurunan outstanding piutang negara berasal dari optimalisasi BKPN yang tidak didukung dengan barang jaminan dengan penerbitan PSBDT, pelunasan melalui keringanan Crash Program, dan angsuran hutang.

3. Permasalahan pada Seksi Pelayanan Penilaian

Dalam pelaksanaan proses penilaian masih terdapat beberapa permasalahan di Seksi Penilaian, antara lain:

- **Triwulan I**

a. Dari tujuh hasil penilaian, terdapat dua nilai yang tidak digunakan dalam penetapan persetujuan sehingga menimbulkan deviasi 4,19%.

- **Triwulan II**

a. Dari tujuh hasil penilaian, terdapat dua nilai yang tidak digunakan dalam penetapan persetujuan sehingga menimbulkan deviasi, hasil penilai lebih rendah dari nilai limit permohonan sehingga pengelola barang mengajukan nilai yang diajukan oleh pemohon.

- **Triwulan III**
 - a. Pada Triwulan III 2021 tidak terdapat permohonan penilaian pemanfaatan BMN sehingga deviasi ketergunaan hasil penilaian masih sama dengan Triwulan II 2021
 - b. Hasil penilai lebih rendah dari nilai limit permohonan sehingga pengelola barang mengajukan nilai yang diajukan oleh pemohon
- **Triwulan IV**
 - a. Pada Triwulan IV 2021 terdapat 7 (tujuh) permohonan penilaian BMN yang seluruhnya digunakan oleh pengelola dalam memberikan persetujuan pengelolaan BMN atau deviasi ketergunaan hasil penilaian 0%. Hal ini mengakibatkan Index deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian menurun (membaik) jika dibandingkan dengan Index Triwulan III sebesar 1,78% menjadi 1,55%.
 - b. Hasil penilai lebih rendah dari nilai limit permohonan sehingga pengelola barang mengajukan nilai yang diajukan oleh pemohon.

4. Permasalahan pada Seksi Pelayanan Lelang

Dalam pelaksanaan pelayanan lelang masih terdapat beberapa Permasalahan di Seksi Pelayanan Lelang, antara lain:

- **Triwulan I**
 - a. PNBP lelang masih rendah karena banyaknya lelang TAP selain itu objek lelang yang kurang marketable sangat mempengaruhi capaian, permasalahan hukum objek lelang, nilai limit yang belum menggunakan nilai likuidasi.
 - b. Realisasi capaian pokok lelang rendah karena banyaknya lelang TAP serta objek lelang yang kurang marketable, disebabkan kurangnya informasi lelang kepada masyarakat menjadikan lelang kurang diminati, rendahnya daya beli masyarakat, adanya permasalahan hukum atas objek lelang menurunkan minat pembeli.
 - c. Capaian efektivitas lelang Q1 telah melampaui target, realisasi berasal dari 31 frekuensi lelang laku dari total 171 frekuensi lelang, karena banyaknya lelang TAP.
- **Triwulan II**
 - a. Kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terkait lelang sehingga PNBP Bea Lelang masih rendah.
 - b. Realisasi capaian pokok lelang rendah karena banyaknya lelang TAP serta objek lelang yang kurang marketable, disebabkan kurangnya informasi lelang kepada masyarakat menjadikan lelang kurang diminati, rendahnya daya beli masyarakat, adanya permasalahan hukum atas objek lelang menurunkan minat pembeli.
 - c. Capaian efektivitas lelang Q2 telah melampaui target, realisasi berasal dari 65 frekuensi lelang laku dari total 318 frekuensi lelang, karena banyaknya lelang TAP.
 - d. Mayoritas pelaksanaan lelang sepanjang triwulan II 2021 dilakukan dengan e-auction, disebabkan beberapa permohonan lelang masih ada yang meminta lelang konvensional sehingga lelang menjadi kurang optimal.

- **Triwulan III**
 - a. Realisasi capaian pokok lelang rendah karena banyaknya lelang TAP serta objek lelang yang kurang marketable, disebabkan kurangnya informasi lelang kepada masyarakat menjadikan lelang kurang diminati, rendahnya daya beli masyarakat, adanya permasalahan hukum atas objek lelang menurunkan minat pembeli.
 - b. Capaian efektivitas lelang Q3 belum memenuhi target, realisasi berasal dari 110 frekuensi lelang laku dari total 586 frekuensi lelang, karena banyaknya lelang TAP.
 - c. Mayoritas pelaksanaan lelang sepanjang triwulan III 2021 dilakukan dengan e-auction, disebabkan beberapa permohonan lelang masih ada yang meminta lelang konvensional sehingga lelang menjadi kurang optimal.
 - d. Selisih/deviasi PNBP pada Triwulan III TA 2021 berasal dari Bea Lelang.
- **Triwulan IV**
 - a. Capaian efektivitas lelang Q4 belum memenuhi target, rendahnya capaian disebabkan tingginya lelang TAP, karena banyaknya lelang TAP.
 - b. Mayoritas pelaksanaan lelang sepanjang triwulan IV 2021 dilakukan dengan e-auction, disebabkan beberapa permohonan lelang masih ada yang meminta lelang konvensional sehingga lelang menjadi kurang optimal (lelang hasil kayu dari tangan pertama).
 - c. Selisih/deviasi PNBP pada Triwulan IV TA 2021 berasal dari Bea Lelang, rekonsiliasi PNBP melibatkan beberapa pihak pemilik sumber data sehingga harus sering dilakukan koordinasi memperhatikan jangka waktu pelaporan.

5. Permasalahan pada Seksi Hukum dan Informasi

Permasalahan yang kerap terjadi pada Seksi Hukum dan Informasi secara umum, sebagai berikut:

- a. Dalam hal pengembalian uang jaminan lelang, masih terdapat peserta lelang mencantumkan nomor rekening dan nama Bank yang salah, sehingga menghambat Bendahara Penerima dalam pengembalian tepat waktu dan akhirnya terjadi miskomunikasi antara peserta lelang tersebut dengan Bendahara Penerima;
- b. Sarana dan prasarana dokumentasi sudah terlalu lama dan perlu pembaharuan;
- c. Banyak gugatan perkara yang ditujukan/diterima KPKNL Purwakarta, namun Anggaran DIPA Penanganan Perkara terbatas.

6. Permasalahan pada Subbagian Umum

Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab pada Subbagian Umum yaitu IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai dan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Secara umum, capaian kinerja Subbagian Umum dapat dikatakan Baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya IKU yang tidak tercapai targetnya, baik merujuk pada capaian pengembangan kompetensi pegawai maupun dari

capaian persentase kualitas anggaran. Namun demikian, bukan berarti tidak terdapat kendala. Pada IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, terdapat beberapa hal yang menyebabkan capaian IKU tidak optimal, antara lain:

- **Triwulan II**

- a. Revisi atas penghematan anggaran pada Triwulan I mengakibatkan munculnya penambahan output pengelolaan aset BUN, yang mengakibatkan ketidaksesuaian pada saat penginputan konfirmasi capaian output disebabkan meningkatnya kasus COVID19 terutama di akhir periode triwulan II.
- b. Pelaksanaan realisasi belanja yang tidak sesuai dengan RPD walaupun secara keseluruhan mencapai target 40% untuk Triwulan II, disebabkan terdapat perubahan rencana kerja selama tahun berjalan.

- **Triwulan III**

- a. Realisasi capaian kualitas pelaksanaan anggaran belum mencapai target, disebabkan meningkatnya kasus COVID19 terutama di awal periode triwulan III, terdapat perubahan rencana kerja selama tahun berjalan, berakibat pada adanya deviasi realisasi dengan RPD dan tersendatnya capaian output

- **Triwulan IV**

- a. Terdapat perubahan rencana kerja selama tahun berjalan, berakibat pada adanya deviasi realisasi dengan RPD dan tersendatnya capaian output.

7. Permasalahan pada Seksi Kepatuhan Internal

Permasalahan yang kerap terjadi pada Seksi Kepatuhan Internal secara umum ialah adanya peraturan dan pedoman yang menjadi acuan pelaksanaan tugas pada Seksi Kepatuhan Internal yang sering mengalami perubahan dari Kantor Pusat DJKN, sehingga diperlukan penyesuaian dalam penerapannya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pelaksanakan tugas dan fungsi KPKNL Purwakarta berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2020, telah disusun berdasarkan peta strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kantor Pusat DJKN menetapkan target kinerja KPKNL Purwakarta Tahun 2021 yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja dan dijabarkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU).

A. Rencana Strategis

1. Misi

Misi KPKNL Purwakarta adalah :

- 1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
- 2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik administrasi dan hukum.
- 3) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam berbagai keperluan penilaian.
- 4) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- 5) Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat pengguna.

2. Tujuan

KPKNL Purwakarta mempunyai tujuan organisasi yakni mampu menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang bertanggungjawab, profesional dan dipercaya masyarakat pengguna jasa di wilayah kerja KPKNL Purwakarta.

3. Sasaran

Sasaran yang hendak dituju KPKNL Purwakarta adalah :

- 1) Perwujudan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
- 2) Pengamanan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum.
- 3) Perwujudan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam berbagai keperluan penilaian.
- 4) Pelaksanaan pengurusan piutang negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- 5) Perwujudan lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat pengguna, efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif.

4. Kebijakan

Kebijakan adalah implementasi dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Kebijakan-kebijakan KPKNL Purwakarta dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran adalah :

- 1) Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pekerjaan.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan monitoring pelaksanaan diklat wajib, mengajukan diklat yang sesuai dengan tugas dan fungsi untuk meningkatkan *hard competency*.
- 3) Menerapkan standarisasi kerja yang berbasis pada integritas, ketulusan dan komitmen.
- 4) Menerapkan percepatan proses di bidang pengurusan piutang negara, lelang, kekayaan negara dan penilaian.
- 5) Menerapkan sistem aplikasi dibidang pengurusan piutang negara, lelang, kekayaan negara dan penilaian yang berbasis pada teknologi informasi.
- 6) Meningkatkan pelayanan di bidang hukum dan informasi yang meliputi percepatan proses penyelesaian perkara di pengadilan (litigasi) dan pemberian keterangan atau informasi kepada pihak terkait.

5. Program Kerja

Program kerja yang ditetapkan KPKNL Purwakarta tidak terlepas dari kebijakan yang telah diambil dan menjadi acuan bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Program kerja KPKNL Purwakarta meliputi program kerja yang terurai kedalam program kerja masing-masing unit kerja. Berikut Program Kerja KPKNL Purwakarta :

1) Pelayanan di bidang Lelang

- a) Memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa lelang;
- b) Memberikan konsultasi kepada *stakeholder* tentang peraturan, syarat dan prosedur lelang;
- c) Melaksanakan lelang online secara optimal;
- d) Mempercepat proses penyelesaian Risaiah Lelang baik minuta, kutipan maupun salinan tepat waktu;
- e) Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pemohon lelang;
- f) Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat.

2) Pelayanan di Bidang Pengurusan Piutang Negara

- a) Mempercepat proses pengurusan Piutang Negara untuk berkas kasus Piutang Negara yang baru diserahkan;
- b) Melakukan kegiatan bersifat persuatif guna menggugah kesadaran debitur agar mau mengangsur hutang mengingat kegiatan eksekusi sudah tidak dapat dilakukan;

- c) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan penyerah piutang;
- d) Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat.

3) Pelayanan di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

- a) Memberikan pelayanan prima dengan memberikan pengarah dan perbantuan optimal dalam implementasi program SIMAN;
- b) Mempercepat proses permohonan utilisasi dengan tidak mengurangi kecermatan dan kelengkapan berkas permohonan;
- c) Mengelola kekayaan negara dengan efektif dan efisien;
- d) Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat.

4) Pelayanan di Bidang Penilaian

- a) Mempercepat proses permohonan penilaian baik penilaian BMN maupun penilaian barang jaminan hutang dengan tepat waktu dan berkualitas;
- b) Menyelesaikan penilaian kembali (revaluasi).
- c) Menyusun database penilaian guna mendukung informasi penilaian yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan;
- d) Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat;

5) Pelayanan di Bidang Hukum dan Informasi

- a) Memberikan pelayanan yang optimal dalam setiap permohonan verifikasi jumlah hutang dalam rangka penerbitan SPPNS, SPPNL dan PSBDT;
- b) Monitoring dan evaluasi kepatuhan dan layanan hukum yang efektif;
- c) Memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi;
- d) Menerapkan aplikasi Sibankum;
- e) Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat;

6) Pelayanan di Bidang Umum

- a) Memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh unit kerja KPKNL Purwakarta dengan memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan secara maksimal;
- b) Memberikan dorongan pembentukan SDM yang berintegrasi dan berkompentensi tinggi;
- c) Mengelola anggaran dengan optimal;
- d) Menyampaikan laporan yang cepat dan akurat;

B. Penetapan Kinerja

1. Perjanjian Kinerja

Mampu menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang bertanggung jawab, profesional dan dipercaya masyarakat di wilayah kerja KPKNL Purwakarta merupakan misi KPKNL Purwakarta. Untuk mewujudkan misi tersebut, dibuatlah perjanjian kinerja yang disepakati antara Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat selaku pejabat tertinggi di wilayah kerja Provinsi Jawa Barat dengan Kepala KPKNL

Purwakarta. Dalam perjanjian kinerja tersebut memuat butir-butir yang telah ditetapkan dalam garis besar peta strategi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yaitu :

- 1). Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
- 2). Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien;
- 3). Pengelolaan lelang yang optimal;
- 4). Manajemen pelayanan yang berkualitas;
- 5). Tata kelola kekayaan Negara yang efektif;
- 6). Penilaian yang berkualitas;
- 7). Tata kelola lelang yang efektif;
- 8). Edukasi yang efektif;
- 9). Pengawasan dan pengendalian yang efektif;
- 10). SDM yang kompeten;
- 11). Organisasi yang fit for purpose;
- 12). Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal;

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Purwakarta :

1. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK
2. Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang
3. Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)
4. Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang
5. Persentase Realisasi Pokok Lelang
6. Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL (Tahunan)
7. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan
8. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)
9. Deviasi ketergunaan hasil penilaian
10. Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN
11. Persentase produktivitas lelang
12. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction
13. Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN
14. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi
15. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara
16. Persentase pengembangan kompetensi pegawai
17. Nilai hasil review pengelolaan kinerja (Tahunan)
18. Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator
19. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

3. Realisasi Tahun 2021

A. Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK

Penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk existing luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan. Target Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2021 KPKNL Purwakarta sebesar **62%**, capaian pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dihitung berdasarkan jumlah presentase kesesuaian hasil pengukuran tahun 2020 x 75% dan presentase optimalisasi hasil pengukuran tahun 2021 x 25%

- Target SBSK optimalisasi 2020 sebanyak 105 NUP (Satker Kemenkeu), tercapai 105 NUP, dengan nilai tingkat kesesuaian sebesar 54,63%
- Target SBSK Pengukuran 2021 sebanyak 23 NUP, tercapai 28 NUP, dengan nilai tingkat kesesuaian sebesar 63,81%.

Sehingga total capaian keseluruhan sebesar 62,17%, dengan persentase capaian **100,27%**.

B. Persentase penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan Negara dan lelang

Target persentase penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan Negara dan lelang (PNBP Pengelolaan BMN, PNBP Piutang Negara, dan PNBP Lelang) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta Tahun 2021 sebesar Rp. 17.679.100.000,- dengan persentase 100%. Dari target tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 17.016.061.653,- atau sebesar **96.25%**. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian IKU Tahun 2021	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	% Capaian
1.	PNBP Pengelolaan Negara	Rp. 6.006.000.000,-	Rp. 6.259.167.351,-	104,21%
2.	PNBP Piutang Negara	Rp. 38.000.000,-	Rp. 7.590.195,-	19,97%
3.	PNBP Lelang	Rp. 11.635.000.000,-	Rp. 10.749.304.107,-	92,38%
	Total	Rp. 17.679.000.000,-	Rp. 17.016.061.653,-	96,25%

C. Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PND S.d 2017)

Target persentase penurunan outstanding piutang Negara (saldo PND S.d. 2017) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta Tahun 2021 sebesar Rp. 884.628.832,-. Dari target tersebut dapat direalisasikan

penurunan outstanding piutang Negara sebesar Rp. 1.130.552.249,- dengan nilai capaian **127,80 %**.

D. Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan Negara dan lelang

Target Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan Negara dan lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta pada tahun 2021 sebesar **88**. Dari 88 target indeks tersebut, dapat direalisasikan sebesar indeks **97,24** dengan persentase capaian **110,49%**.

E. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Target Pokok Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2021 secara keseluruhan ditetapkan sebesar **Rp. 249.000.000.000,-**. Dari target tersebut, dapat direalisasikan sebesar **Rp. 304.344.064.566,-** atau **122,23%**, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian IKU Tahun 2021	Target IKU Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	% Capaian
Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	Rp. 249.000.000.000,-	Rp. 304.344.064.566,-	122,23%
Pokok Lelang Kelas I	Rp. 197.000.000.000,-	Rp. 206.557.827.566,-	90,14%
Pokok Lelang Pegadaian	Rp. 52.000.000.000,-	Rp. 97.786.237.000,-	74,52%

F. Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL

Target indeks kepuasan pengguna layanan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta menetapkan Indeks Kepuasan Layanan pada tahun 2020 **4,54**. Dari target tersebut, dapat direalisasikan **4,71** dengan persentase capaian **103.74%** setiap seksi yang di seksi teknis menyebarkan kuesioner kepada pengguna jasa /Satuan Kerja K/L.

G. Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan

Target persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2021 sebesar **100%** (sebanyak 19 bidang tanah yang disertipikatkan). Dari target tersebut, dapat direalisasikan **131%** dengan capaian sebanyak **25** bidang tanah yang telah disertifikatkan.

H. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 triliun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset). Target persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2021 sebesar **100%** dengan target **78** aset yang akan dievaluasi. Dari target tersebut, dapat direalisasikan sebesar **106,41%** (sebanyak **83** aset yang dievaluasi kinerjanya), dengan persentase capaian **106,41%**.

I. Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Deviasi ketergantungan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Target deviasi ketergantungan nilai penilaian pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2021 sebesar **22%**. Dari target tersebut, diperoleh capaian deviasi ketergantungan hasil penilaian sebesar **1,55%** dengan persentase capaian **120%**.

J. Persentase efektivitas penyelesaian BKPN

Target persentase efektivitas penyelesaian BKPN pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2021 sebesar **100%** (sebanyak **30** BKPN yang telah dinyatakan selesai). Dari target tersebut, dapat direalisasikan **103,33%** (sebanyak **31** BKPN yang telah dinyatakan selesai).

K. Persentase produktivitas lelang

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Target persentase produktivitas lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2021 sebesar **35%**. Dari target tersebut, diperoleh realisasi sebesar **28,52%** dengan persentase capaian **81,48%**.

L. Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi e-auction meliputi:

- 1) Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- 2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan

infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account)

Target pelaksanaan e-Auction dan e-Conventional Auction pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2021 adalah sebesar **92%** dari realisasi frekuensi lelang dan dapat direalisasikan sebesar **98,02%** dari frekuensi lelang dengan persentase capaian **106,55%**.

M. Deviasi Data PNBPFungsional DJKN

Target IKU Deviasi Data PNBPFungsional DJKN pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta pada tahun 2021 sebesar **12,5%**. Dari target tersebut, diperoleh capaian deviasi data PNBPFungsional DJKN sebesar **0,01%** dengan persentase capaian **120%**.

N. Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh KPKNL kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Target tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2021 ditetapkan sebesar **89**, dapat direalisasikan sebesar **92,91** dengan capaian **104,39%**.

O. Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara

IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang. Target persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan asset pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2021 ditetapkan sebesar **85%**, dapat direalisasikan sebesar **91,30%** dengan capaian **107,42%**.

P. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Kegiatan pelatihan dilakukan sebagai upaya peningkatan kompetensi pegawai. Pengajaran diklat pegawai disesuaikan dengan tugas dan fungsi untuk meningkatkan *hard competency*. Target persentase pengembangan kompetensi pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2021 ditetapkan sebesar **100%**. Dapat direalisasikan sebesar **120%**.

Q. Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja (Tahunan)

IKU ini bertujuan untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang. Realisasi capaian berasal dari hasil penilaian Kantor Wilayah atas pengelolaan kinerja. Penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja.

Target IKU Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja (Tahunan) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta pada tahun 2021 sebesar **75**. Dari target tersebut, diperoleh capaian nilai sebesar **97,51**, dengan persentase capaian **120%**.

R. Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai feedback peserta terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan. Target indeks efektivitas pelaksanaan FGD pejabat administrator pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2021 ditetapkan sebesar **80**. Dapat direalisasikan sebesar **96,36**, dengan capaian sebesar **120%**.

S. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu **capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto**, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu **penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM**. Penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi 70% komponen hasil dan 30% komponen proses. Target Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta tahun 2021 ditetapkan **95,5%**. Dapat direalisasikan sebesar **95,76%**, dengan capaian **100,27%**.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun Anggaran 2021, secara umum KPKNL Purwakarta telah mencapai target yang ditetapkan, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **109,08%**. Lebih jelasnya dibawah ini adalah gambaran tentang perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja tahun 2021:

Kode	IKU	V/C	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)							26,24 %	
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							104,95 %	
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	62,17%	19%	40%	100,270%	100,27 %	hijau
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	96,25%	14%	30%	96,250 %	96,25 %	kuning
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	128%	14%	30%	127,80 %	120,00 %	hijau
	Customer Perspective(15%)							16,47 %	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							115,82 %	
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	P/H	88,00	97,24	11%	44%	110,49 %	110,49 %	hijau
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	122,23%	14%	56%	122,23 %	120,00 %	hijau
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							103,74 %	
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4,54	4,71	21%	100%	103,74 %	103,74 %	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							32,34 %	
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							116,60 %	
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	131,58%	19%	43%	131,58 %	120,00 %	hijau

4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	106,41%	11%	25%	106,41 %	106,41 %	hijau
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	1,55%	14%	32%	192,95 %	120,00 %	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							102,84 %	
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	100%	103,33%	14%	25%	103,33 %	103,33 %	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35,00%	28,52%	14%	25%	81,48 %	81,48 %	kuning
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92,00%	98,02%	14%	25%	106,55 %	106,55 %	hijau
5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	P/M	12,50%	0,01%	14%	25%	199,96 %	120,00 %	hijau
6	Edukasi yang efektif							104,39 %	
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	89	92,91	14%	100%	104,39 %	104,39 %	hijau
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							107,42 %	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	91,30%	14%	100%	107,42 %	107,42 %	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)							34,03 %	
8	SDM yang kompeten							120,00 %	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00 %	120,00 %	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose							120,00 %	
9a-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	75	97,51	14%	50%	130,01 %	120,00 %	hijau
11c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	96,35	14%	50%	120,44 %	120,00 %	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							100,27 %	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	95,76%	14%	100%	100,27 %	100,27 %	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								109,08 %	hijau

Perbandingan capaian kinerja KPKNL Purwakarta Tahun 2021 dengan capaian kinerja sebelumnya tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut:

PNBP Aset

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	PNBP Aset	2019	49.142.167.172	55.185.370.156	112,29%
2.	PNBP Aset	2020	5.336.100.000	3.717.185.735	70%
3.	PNBP Aset	2021	6.006.000.000	6.259.167.351	104,21%

PIUTANG NEGARA DAPAT DISELESAIKAN (PNDS)

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	PNDS	2019	984.668.228	1.340.065.186	136,09%
2.	Penyelesaian Outstanding tahun 2016 ke Bawah	2020	148.735.388	150.116.245	101%
3.	Penyelesaian Outstanding tahun 2017 ke Bawah	2021	884.628.832	1.130.552.249	127,8%

BIAYA ADMINISTRASI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	BIAD PPN	2019	85.990.166	118.772.991	138,12%
2.	BIAD PPN	2020	38.000.000	102.359.724	249%
3.	BIAD PPN	2021	38.000.000	7.590.195	19,97%

BKPN YANG DAPAT DISELESAIKAN

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	BKPN SELESAI	2019	15	24	160%
2.	BKPN SELESAI	2020	15	22	147%
3.	BKPN SELESAI	2021	30	31	103,33%

*) pada tahun 2021 BKPN dihitung sesuai dengan pembobotan berdasarkan tahun SP3N

POKOK LELANG

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	POKOK LELANG	2019	190.690.000.000	178.514.328.269	93,61%
2.	POKOK LELANG	2020	242.577.000.000	211.826.973.319	87%
3.	POKOK LELANG	2021	249.000.000.000	304.344.064.566	122,23%

BEA LELANG

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	BEA LELANG	2019	8.144.463.482	6.233.648.493	76,5%
2.	BEA LELANG	2020	8.827.000.000	7.816.527.453	89%
3.	BEA LELANG	2021	11.635.000.000	10.749.304.107	92,38%

B. Analisis Kinerja

1. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja dan Kegiatan **Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara**

a. Isu Utama dan Implikasi

- 1) Capaian pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dihitung berdasarkan jumlah presentase kesesuaian hasil pengukuran tahun 2021 x 75% dan presentase optimalisasi hasil pengukuran tahun 2020 x 25%
 - Target SBSK optimalisasi 2020 sebanyak 105 NUP (Satker Kemenkeu), tercapai 105 NUP, dengan nilai tingkat kesesuaian sebesar 54,63%
 - Target SBSK Pengukuran **2021** sebanyak **23 NUP**, tercapai **28 NUP**, dengan nilai tingkat kesesuaian sebesar 63,81%Sehingga total capaian keseluruhan sebesar **62,17%**
- 2) Target IKU Bidang tanah yang disertifikatkan dari 19 bidang tanah sudah terealisasi 25 bidang tanah dengan status P4 (Sudah terbit SHP)
Sehingga target tercapai sebesar 131% .
- 3) Target persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) pada tahun 2021 sebanyak 78 NUP BMN yang menjadi target evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) di wilayah kerja KPKNL Purwakarta s.d. Triwulan IV telah terselesaikan sebanyak 83 NUP. Sehingga target tercapai sebesar 106,41 %
- 4) Target persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan Negara Dari 24 persetujuan yang diterbitkan dalam kurun waktu Semester II/2020, telah ditindaklanjuti sebanyak 22 persetujuan. Dari 22 persetujuan yang diterbitkan dalam kurun waktu Semester I/2021, telah ditindaklanjuti sebanyak 20 persetujuan. Sehingga capaian IKU sebesar 91,30%.

b. Akar Masalah

Pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2021 terbagi menjadi 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- 1) Pengukuran kesesuaian adalah pendataan dan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK untuk BMN target pada satker target tahun 2021.
- 2) Optimalisasi adalah pengukuran kembali tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK untuk BMN yang telah diukur tahun 2020.
- 3) Pencapaian target IKU Bidang tanah yang disertifikatkan kurang maksimal terkendala karena ada penguasaan dari pihak ketiga/masyarakat setempat. Satker tidak dapat memenuhi kelengkapan dokumen di tahun 2021

- 4) Dalam situasi pandemi perlu kehati-hatian dalam melakukan cek fisik dalam rangka evaluasi kinerja BMN. Diperlukan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik.
 - 5) Persetujuan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN yang telah terbit tidak ditindaklanjuti, salah satu sebab karena satker belum memahami proses pengajuan lelang BMN secara *online*.
- c. Tindakan yang telah dilaksanakan
- 1) Melakukan survey pendataan, mengalisis dan menghitung optimalisasi SBSK pada satker di lingkungan Kementerian Keuangan, serta satker lain yang menjadi target pengukuran.
 - 2) Melaksanakan sosialisasi terkait Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN, bersama Seksi Pelayanan Penilaian dan Seksi Pelayanan Lelang
 - 3) Melaksanakan wasdal atas Persetujuan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN yang telah terbit dan belum ditindaklanjuti oleh satker
 - 4) Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kab. Karawang terkait peningkatan 6 bidang tanah P3 agar segera menjadi P4 dan 3 bidang P1 (bidang pengganti K3 Subang) terkait kelengkapan dokumen persyaratan persertipikatan tanah yang harus disiapkan satker
 - 5) Koordinasi intensif dengan satker BPS Karawang yang mendapat target baru 3 bidang tanah (pengganti 1 bidang tanah K3 di Kab. Subang), agar segera melengkapi dokumen persyaratan persertipikatan tanah
 - 6) Melaksanakan survey dan penghitungan evaluasi kinerja BMN pada Polres Purwakarta yang merupakan sisa target yang belum diselesaikan.
 - 7) Melaksanakan wasdal atas Persetujuan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN yang telah terbit dan belum ditindaklanjuti oleh satker.
- d. Rekomendasi Rencana Aksi
- 1) Melakukan sosialisasi kepada satker target.
 - 2) Melaksanakan survey pendataan, verifikasi data dan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK terhadap BMN target.
 - 3) Melaksanakan sosialisasi terkait Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN, bersama Seksi Pelayanan Penilaian dan Seksi Pelayanan Lelang.
 - 4) Melaksanakan wasdal atas Persetujuan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN yang telah terbit dan belum ditindaklanjuti oleh satker.
 - 5) Koordinasi dengan Kantah-kantah dimana lokasi tanah yang menjadi target sertifikasi 2022.
 - 6) Koordinasi dengan satker-satker yang BMN berupa tanahnya menjadi target sertifikasi 2022.
 - 7) Sosialisasi kepada satker yang menjadi target.
 - 8) Koordinasi dengan BPS terkait data-data yang diperlukan dalam perhitungan yang bersumber dari BPS.
 - 9) Melakukan survey dan penghitungan evaluasi kinerja BMN pada satker yang menjadi target tahun 2022.
 - 10) Melaksanakan wasdal secara intensif atas Persetujuan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN yang telah terbit dan belum ditindaklanjuti oleh satker.
2. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja dan Kegiatan **Seksi Piutang Negara**
- a. Isu Utama dan Implikasi
- 1) PNBP PN menghasilkan capaian 19,97%.
 - 2) BKPN yang menjadi target penurunan outstanding piutang negara sebagian besar adalah BKPN yang tidak potensial dan sulit untuk ditingkatkan ke tahap pengurusan yang optimal namun dengan intensifikasi pengurusan piutang negara seluruh target dapat terealisasi.
 - 3) Realisasi capaian penyelesaian BKPN berasal dari penerbitan PSBDT dan pelunasan hutang. Hal ini merupakan respon positif dari panggilan/himbauan

terhadap debitur dan/atau penjamin hutang/pemilik barang jaminan serta hasil pelaksanaan penelitian lapangan.

- 4) Capaian penurunan outstanding piutang negara berasal dari optimalisasi BKPN yang tidak didukung dengan barang jaminan dengan penerbitan PSBDT, pelunasan melalui keringanan Crash Program, dan angsuran hutang.
 - 5) Realisasi penyelesaian BPKN berasal dari pelunasan, PSBDT dan Pengembalian BKPN.
- b. Akar Masalah
- 1) Debitur tidak mengakui mempunyai hutang.
 - 2) Sebagian besar barang jaminan hutang milik Pihak ketiga dan tidak ada pengikatan.
 - 3) Sebagian besar BKPN yang diurus adalah BKPN yang tidak potensial sehingga capaian IKU penerimaan negara (Biad PPN) menjadi rendah.
 - 4) Target penurunan outstanding piutang negara adalah penurunan nilai outstanding piutang negara BKPN penyerahan s.d. Desember 2017 yang sebagian besar merupakan BKPN yang tidak potensial (debitur mampu namun tidak mengakui hutang, BKPN dengan barang jaminan yang tidak ada pengikatan atau BKPN yang didukung dengan barang jaminan milik pihak ketiga serta barang jaminan yang belum diketahui kejelasan dokumen kepemilikannya).
 - 5) Sebagian besar BKPN merupakan BKPN yang tidak potensial.
- c. Tindakan yang telah dilaksanakan
- 1) Sosialisasi pengurusan piutang negara.
 - 2) Membuat himbauan/panggilan terhadap semua Penanggung Hutang untuk melakukan angsuran/menyelesaikan hutangnya.
 - 3) Menyampaikan pemberitahuan tentang Penyelesaian Hutang dengan mekanisme Crash Program.
 - 4) Himbauan/panggilan terhadap semua Penanggung Hutang untuk melakukan angsuran/menyelesaikan hutangnya.
 - 5) Penelitian Lapangan terhadap keberadaan dan kemampuan Penanggung Hutang penyerahan s.d. tahun 2017 dalam rangka penerbitan PSBDT.
 - 6) Himbauan/panggilan terhadap semua Penanggung Hutang untuk melakukan angsuran/menyelesaikan hutangnya.
 - 7) Penelitian Lapangan terhadap keberadaan dan kemampuan Penanggung Hutang penyerahan s.d. tahun 2017 dalam rangka penerbitan PSBDT.
 - 8) Sosialisasi pengurusan piutang negara ke Pemkab Subang dan RSUD Bayu Asih.
- d. Rekomendasi Rencana Aksi
- 1) Membuat himbauan/panggilan terhadap semua Penanggung Hutang untuk melakukan angsuran/menyelesaikan hutangnya.
 - 2) Melakukan intensifikasi penagihan dan penyampaian Surat Paksa BKPN penyerahan dari DJKN dan LPDB KUMKM.
 - 3) Meningkatkan tahap pengurusan piutang negara ke tahap optimal.
 - 4) Himbauan/panggilan terhadap semua Penanggung Hutang untuk melakukan angsuran/menyelesaikan hutangnya.
 - 5) Penelitian Lapangan terhadap keberadaan dan kemampuan Penanggung Hutang dalam rangka penerbitan PSBDT.
 - 6) Meningkatkan tahap pengurusan piutang negara ke tahap optimal.
 - 7) Koordinasi dengan RSUD Bayu Asih dalam rangka rencana penyerahan pengurusan piutang negara/daerah.
 - 8) Himbauan/panggilan terhadap semua Penanggung Hutang untuk melakukan angsuran/menyelesaikan hutangnya.
 - 9) Penelitian Lapangan terhadap keberadaan dan kemampuan Penanggung Hutang dalam rangka penerbitan PSBDT.
 - 10) Meningkatkan tahap pengurusan piutang negara ke tahap optimal.

- 11) Koordinasi dengan RSUD Bayu Asih dalam rangka rencana penyerahan pengurusan piutang negara/daerah.
3. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja dan Kegiatan **Seksi Pelayanan Penilaian**
 - a. Isu Utama dan Implikasi
 - 1) Pada Triwulan IV 2021 terdapat 7 (tujuh) permohonan penilaian BMN yang seluruhnya digunakan oleh pengelola dalam memberikan persetujuan pengelolaan BMN atau deviasi ketergunaan hasil penilaian 0%. Hal ini mengakibatkan Index deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian menurun (membaik) jika dibandingkan dengan Index Triwulan III sebesar 1,78% menjadi 1,55%.
 - b. Akar Masalah
 - 1) Hasil penilai lebih rendah dari nilai limit permohonan sehingga pengelola barang mengajukan nilai yang diajukan oleh pemohon.
 - c. Tindakan yang telah dilaksanakan
 - 1) Menjadikan berkas permohonan penilaian sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan perhitungan nilai wajar tanpa mengabaikan independensi penilai.
 - 2) Meninjau kembali/menambah cakupan data pembanding jika terjadi perbedaan yang cukup besar antara draft nilai wajar hasil perhitungan penilai dengan usulan nilai yang diajukan oleh pemohon.
 - 3) Mengedukasi pemohon dalam mengajukan usulan nilai limit agar mencerminkan nilai yang wajar.
 - d. Rekomendasi Rencana Aksi
 - 1) Memastikan pelaksanaan peer review untuk setiap konsep laporan penilaian demi mewujudkan hasil penilaian yang berkualitas.
 - 2) Meningkatkan koordinasi dengan seksi PKN terkait acuan nilai dalam persetujuan yang diperhitungkan dalam deviasi ketergunaan hasil penilaian.
 4. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja dan Kegiatan **Seksi Pelayanan Lelang**
 - a. Isu Utama dan Implikasi
 - 1) Sesuai rencana aksi, potensi PNBPN lelang berasal dari lelang BMN, Lelang BMD dan lelang rampasan Kejaksaan, namun demikian PNBPN Lelang menghasilkan capaian 92,39%.
 - 2) Realisasi capaian pokok lelang terealisasi dengan maksimal berasal dari lelang yang dilaksanakan akhir triwulan IV dan laku.
 - 3) Capaian efektivitas lelang Q4 belum memenuhi target, rendahnya capaian disebabkan tingginya lelang TAP.
 - 4) Mayoritas pelaksanaan lelang sepanjang Triwulan IV 2021 dilakukan dengan e-auction.
 - 5) Selisih/deviasi PNBPN pada Triwulan IV TA 2021 berasal dari Bea Lelang.
 - b. Akar Masalah
 - 1) Banyaknya lelang TAP disebabkan :
 - Nilai limit terlalu tinggi
 - Objek lelang bermasalah (*non clear and clean*)
 - Objek lelang tidak marketable
 - 2) Kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terkait lelang.
 - 3) Rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti lelang karena kurangnya informasi tentang lelang serta rendahnya daya beli masyarakat.
 - 4) Adanya permasalahan hukum sehingga menurunkan minat pembeli.
 - 5) Beberapa permohonan lelang masih ada yang meminta lelang konvensional sehingga lelang menjadi kurang optimal (lelang hasil kayu dari tangan pertama).

- 6) Rekonsiliasi PNBP melibatkan beberapa pihak pemilik sumber data sehingga harus sering dilakukan koordinasi memperhatikan jangka waktu pelaporan.
- c. Tindakan yang telah dilaksanakan
- 1) Penggalian potensi lelang ke perbankan/pemda atau satker secara langsung dan melalui surat.
 - 2) Penggalian potensi lelang melalui surat dan kunjungan langsung ke perbankan, satker, maupun pemda di wilayah kerja KPKNL Purwakarta pada bulan Oktober, November, Desember 2021.
 - 3) Menjadwalkan dan melaksanakan lelang sesuai SOP.
 - 4) Menetapkan dan melaksanakan lelang melalui internet untuk setiap permohonan lelang yang masuk, kecuali atas pertimbangan khusus dari pemohon lelang.
 - 5) Koordinasi dengan masing masing pihak pemilik data (Subbag Umum, Seksi PN, Seksi Pelayanan Lelang, Seksi HI).
- c. Rekomendasi Rencana Aksi
- 1) Penggalian dan koordinasi potensi lelang Kepada UMKM.
 - 2) Melakukan koordinasi dan penggalian potensi lelang baik ke Pemda, Satker, ataupun Perbankan.
 - 3) Penggalian potensi lelang UMKM wilayah Karawang.
 - 4) Mengusahakan untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah lelang laku melalui koordinasi dengan stakeholder dan penggalian potensi lelang terhadap objek lelang potensial laku.
 - 5) Melakukan penggalian potensi lelang umkm wilayah Karawang dan melaksanakan lelang UMKM.
 - 6) Melakukan sosialisasi kepada stuan kerja terkait permohonan lelang online.
 - 7) Meningkatkan pelayanan guna peningkatan pemahaman kepada stakeholders/pemohon lelang tentang prosedur pelaksanaan lelang online.
 - 8) Koordinasi antar seksi terkait (Subbagian Umum, Seksi HI, Seksi PN) guna mempercepat proses rekonsiliasi.
 - 9) Mendorong operator dropbox lelang untuk menginput data PNBP Bea Lelang secara tertib dan tepat waktu, berkoordinasi dengan bendahara penerimaan terkait data PNBP bea lelang PL I dan subbag umum terkait bea lelang pegadaian.
4. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja dan Kegiatan **Seksi Kepatuhan Internal**
- c. Isu Utama dan Implikasi
- 1) Hasil review Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat atas pelaksanaan pengelolaan kinerja berbasis BSC pada KPKNL Purwakarta dengan indeks sebesar 97,51 menunjukkan kategori hasil review "Kami mengelola kinerja dengan sangat baik"
 - 2) Parameter yang diukur pada efektivitas penyelenggaraan FGD berdasarkan beberapa aspek yaitu *delivery* (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator), *understanding* (pemahaman peserta terhadap materi FGD), *learning enthusiasm* (antusiasme pegawai terhadap kegiatan FGD), *contribution to learning* (dampak kegiatan FGD kepada peningkatan kapasitas pegawai) telah memadai, terlihat dari *feedback* yang diperoleh.
 - 3) Realisasi capaian berasal dari hasil penilaian Kantor Wilayah atas pengelolaan kinerja. Penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja.
 - 4) Realisasi capaian berasal dari *feedback* yang diberikan pegawai serta indeks kecepatan pelaksanaan FGD Pejabat Administrator.
 - 5)
- d. Akar Masalah
-

- e. Tindakan yang telah dilaksanakan
 - 1) Melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan kinerja antara lain:
 - Perencanaan
 - Pelaksanaan/eksekusi
 - Monitoring dan evaluasi
 - Edukasi
 - 2) Melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan kinerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi, intensitas edukasi pengelolaan kinerja serta mendokumentasikan seluruh kegiatan dimaksud.
 - 3) Menyampaikan materi FGD yang sudah ditentukan Setjen Kemenkeu agar seluruh pegawai memahami materi FGD serta aktif dalam diskusi.
 - f. Rekomendasi Rencana Aksi
 - 1) Melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan kinerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi, intensitas edukasi pengelolaan kinerja serta mendokumentasikan seluruh kegiatan.
 - 2) Melaksanakan FGD segera setelah Preliminary FGD Pejabat Administrator.
5. Permasalahan dan Solusi atas Capaian Kinerja dan Kegiatan **Sub Bagian Umum**
- c. Isu Utama dan Implikasi
 - 1) Realisasi capaian berasal dari 34 pegawai telah mengikuti beberapa jenis pengembangan kompetensi sehingga melebihi kriteria pengukuran SDM yang kompeten.
 - 2) Realisasi capaian kualitas pelaksanaan anggaran dapat mencapai target.
 - 3) Tidak ada kendala berarti pada Triwulan IV, realisasi anggaran beserta komponen lainnya telah sesuai target yang ditetapkan
 - d. Akar Masalah
 - 1) Terdapat perubahan rencana kerja selama tahun berjalan, berakibat pada adanya deviasi realisasi dengan RPD dan tersendatnya capaian output.
 - 2) Realisasi Belanja KPKNL Purwakarta sebagian besar telah dilaksanakan pada Triwulan I hingga awal Triwulan IV periode Tahun Anggaran Berjalan, dan dapat dipertahankan.
 - e. Tindakan yang telah dilaksanakan
 - 1) Mendorong pegawai untuk meningkatkan kompetensi dengan mengikuti e-learning melalui KLC.
 - 2) Meneruskan informasi pelaksanaan webinar.
 - 3) Rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang diadakan tiap bulan.
 - 4) Revisi DIPA pergeseran antar akun sebagai penyesuaian rencana kegiatan seksi teknis.
 - 5) Revisi halaman III DIPA (RPD) sbg tindak lanjut dalam rangka pencapaian IKU PKPA.
 - 6) Monitoring Pelaksanaan Anggaran secara mandiri oleh seksi teknis pada tautan <https://linktr.ee/keu.506208>, yang diupdate tiap minggu.
 - 7) Melaksanakan program KPKNL yang telah ditetapkan, dan melakukan percepatan atas realisasi anggaran, terutama terhadap program KPKNL yang terdampak COVID-19 secara langsung.
 - f. Rekomendasi Rencana Aksi
 - 1) Mendorong dan menghimbau setiap pegawai untuk mengikuti diklat/e-learning/shotcourse/webinar dalam memenuhi pengembangan kompetensinya dan disesuaikan dengan rencana pengembangan DKI.
 - 2) Melakukan percepatan pengadaan/ belanja barang.

- 3) Melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, apabila terdapat perubahan rencana kegiatan dapat segera mengajukan usulan revisi dana ataupun RPD.
- 4) Melakukan monitoring secara berkala dan melakukan perbaikan rencana kerja dan penarikan dana secara berkala serta menjaga konsistensi komponen Kualitas Pelaksanaan Anggaran lainnya.

C. Realisasi Anggaran

Berkenaan dengan efisiensi penggunaan Sumber Daya pada KPKNL Purwakarta dalam rangka pembinaan dikepegawaian, berdasarkan data dan usulan ke Kantor Pusat per 31 Desember 2021, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Kenaikan pangkat : 7 orang
- b. Kenaikan Gaji Berkala : 18 orang
- c. Ijin belajar : 3 orang
- d. Pegawai pensiun : 2 orang
- e. Pegawai mengikuti diklat : 34 orang

Tahun Anggaran 2021 KPKNL Purwakarta mendapat alokasi anggaran awal sebesar **Rp. 2.022.435.000,00** (dua miliar dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dalam rangka *refocusing* anggaran terkait penanggulangan Covid-19, pada bulan Februari, Juli, dan Agustus 2021 terdapat penghematan anggaran KPKNL Purwakarta menjadi **Rp. 1.757.479.000,00** (satu miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Pegawai	: Rp.	0,00
Belanja Barang	: Rp.	1.718.055.000,00
Belanja Modal	: Rp.	39.424.000,00

Rincian realisasi belanja:

Belanja Pegawai	: Rp.	0,00
Belanja Barang	: Rp.	1,634,267,420,00
Belanja Modal	: Rp.	<u>39,424,000,00</u>
Total realisasi	: Rp.	1.673.691.420,00

Anggaran yang telah direalisasikan untuk mewujudkan kinerja organisasi KPKNL Purwakarta sebagai berikut:

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Capaian
A)	Nilai IKPA		98,88%
	1.	Pengelolaan UP	8,00%
	2.	Data Kontrak	0,00%
	3.	Kesalahan SPM	4,75%
	4.	Retur SP2D	5,00%
	5.	Hal III DIPA	4,42%
	6.	Revisi DIPA	5,00%
	7.	Penyelesaian Tagihan	0,00%
	8.	Konfirmasi Capaian Output	17,00%

	9.	Rekon LPJ	5,00%
	10.	Perencanaan Kas	0,00%
	11.	Realisasi	14,99%
	12.	Pagu Minus	5,00%
	13.	Dispensasi SPM	5,00%
B)	Nilai SMART		93,38%
Capaian Triwulan IV			95,58%

D. Inovasi

1. Pendekatan kepada Pengguna layanan melalui *Whatsapp Group*

KPKNL Purwakarta khususnya Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) telah membentuk Whatsapp (WA) Group dengan Para Satuan Kerja (Satker) Binaan dalam rangka Edukasi dan Komunikasi terkait PKN, yang senantiasa melayani konsultasi di luar jam kerja termasuk hari libur baik melalui diskusi *chat* interaktif WA Group maupun personal.

2. Program Galang Semangat Pagi (GSP)

Kegiatan ini merupakan perwujudan budaya Kementerian Keuangan dalam waktu 30-45 menit. Dalam GSP tertuang komitmen dan disiplin pegawai KPKNL Purwakarta dalam mengawali hari untuk mencapai tujuan organisasi. GSP diawali dengan pembukaan, pembacaan maklumat pelayanan bersama-sama, sharing informasi singkat (implementasi one day one information) dan ditutup dengan yel-yel bersama. GSP dijadwalkan sebelum mulai jam layanan yaitu pada pukul 08.00 s.d 08.45 WIB bergantian setiap bulannya sehingga seluruh pegawai KPKNL Purwakarta mendapatkan giliran untuk menyampaikan informasinya dan mendapatkan kesempatan untuk berbicara di depan publik (internal).

3. Kuesioner Penilaian PPNPN

Bertujuan agar para Pegawai memberikan masukan yang membangun guna perbaikan ke depan dan juga menjadi salah satu peningkatan pelayanan subbagian umum, khususnya Satpam, Pengemudi, dan Pramubakti pada KPKNL Purwakarta.

4. Notifikasi Pencairan Biaya Perjalanan Dinas dan Tunjangan Kinerja melalui *Whatsapp Blast (Manual)*

Penyampaian notifikasi terkait waktu pencairan biaya perjalanan dinas dan tunjangan kinerja melalui *Whatsapp Blast* (manual), hal ini bertujuan meningkatkan pelayanan subbagian umum, khususnya dukungan informasi kepada para pegawai KPKNL Purwakarta yang melaksanakan perjalanan dinas dan telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.

BAB IV PENUTUP

Secara umum pada Tahun 2020 KPKNL Purwakarta telah mencapai prestasi kerja yang sangat baik, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) per 31 Desember 2021 tercapai sebesar **103,72%**. Sebagian besar target yang telah ditetapkan melalui Indikator-indikator kinerja utama telah mencapai realisasi sesuai atau bahkan melampaui target. Namun masih terdapat indikator kinerja utama yang masih belum dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan baik diantaranya:

1. IKU Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang;
2. IKU Persentase produktivitas lelang.

Meskipun demikian, KPKNL Purwakarta telah melakukan yang terbaik dalam usaha memenuhi target pada indikator-indikator tersebut.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PURWAKARTA

JALAN SILIWANGI NO. 9 PURWAKARTA 41111
TELP (0264) 8304884, 8227888; FAKS (0264) 8225765; SITUS: DJKN.KEMENKEU.GO.ID

NOTA DINAS
NOMOR ND-93/WKN.08/KNL.04/2022

Yth : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021 KPNL Purwakarta
Tanggal : 02 Februari 2022

Sehubungan dengan surat Sekretaris Ditjen nomor: ND-53/KN.1/2022 tanggal 04 Januari 2022 hal Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021 KPNL Purwakarta.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Nunung Ekolaksito

